

## RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015 ini disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

- a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- b) Neraca
- c) Laporan Operasional (LO)
- d) Laporan Perubahan Ekuitas
- c) Catatan Atas Laporan Keuangan

### a) Laporan Realisasi Anggaran

Menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan LRA dan belanja selama periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2015.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2015 adalah berupa Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp. 711.250.000,- atau mencapai **99,98** persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 715.000.000,-.

Realisasi Belanja Daerah pada Tahun Anggaran 2015 adalah sebesar Rp. 285.755.719.828,- atau mencapai 94,07 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 303.780.015.000,-

### b) Neraca

Menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014.

Nilai aset per 31 Desember 2015 dicatat dan disajikan sebesar Rp. **223.437.152.137,90**, yaitu terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp. **400.403.633,-** dan aset lainnya (netto) sebesar Rp. 336.550.800,-.

### c) Laporan Operasional

Menyajikan berbagai unsur pendapatan LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, dan surplus/defisit LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan LO untuk periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp.711.250.000,- sedangkan jumlah beban sebesar Rp. 274.400.190.984,27 sehingga terdapat Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp. 273.117.815.984,27. Kegiatan Non Operasional dan Pos-pos Luar Biasa masing-masing surplus sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,- sehingga entitas mengalami Defisit LO sebesar Rp. 273.117.815.984,27..



**d) Laporan Perubahan Ekuitas**

Menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2015 adalah sebesar Rp. 211.916.500.259,31 dikurangi defisit LO sebesar Rp. 273.117.815.984,27. Kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp, 406.001.965,54,- dan ditambah transaksi antar entitas sebesar Rp. 0,- sehingga ekuitas pada tanggal 31 Desember 2015 adalah senilai Rp. 223.437.152.137,90,-

**e) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)**

Menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir s.d. tanggal 31 Desember 2015 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2015 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.



## Catatan atas Laporan Keuangan

### BAB I PENDAHULUAN

#### 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

##### 1.1.1. Maksud Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan (SAP, 2010). Laporan keuangan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah disusun untuk menyediakan informasi mengenai Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah selaku entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan (SAP, 2010) :

(a) **Akuntabilitas.** Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

(b) **Manajemen.** Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana.

(c) **Transparansi.** Memberi

kan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundangan.

##### 1.1.2. Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya (SAP, 2010). Pelaporan keuangan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna anggaran



dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan tujuan :

- (a) Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya, apakah telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (b) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- (c) Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- (d) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya.
- (e) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya disajikan dengan susunan sebagai berikut :

- a) Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan
- b) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan

## 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Pasal 99) menyebutkan bahwa :

- a. Kepala SKPD/Kepala Dinas selaku pengguna anggaran menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang dan ekuitas dana yang berada dalam tanggungjawabnya;
- b. Penyelenggaraan akuntansi sebagaimana di maksud pada ayat (1) merupakan pencatatan/penatausahaan atas transaksi keuangan di lingkungan SKPD dan menyiapkan laporan keuangan sehubungan dengan pelaksanaan anggaran dan barang yang dikelola;
- c. Laporan keuangan sebagaimana pada ayat (2) terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan yang disampaikan kepada kepala daerah melalui PPKD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- d. Kepala SKPD selaku pengguna anggaran/pengguna barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD yang menjadi tanggungjawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.



Peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah sebagai dasar penyusunan laporan keuangan yaitu :

- a) Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan Negara;
- b) Undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c) Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- d) Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara;
- e) Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan;
- f) Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- g) Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
- h) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- i) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- j) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- k) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampainya;
- l) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 79 Tahun 2014 Tentang Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015.

### 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

#### Bab 1           Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

#### Bab 2           Ekonomi Makro dan Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan

#### Bab 3           Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Secara Umum
- 3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan



**Bab 4 Kebijakan Akuntansi**

- 4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD
- 4.2. Basis dan Prinsip Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan Ketentuan yang ada Dalam SAP pada SKPD

**Bab 5 Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan**

- 5.1. Penjelasan Pos - Pos Neraca
  - 5.1.1. Aset
  - 5.1.2. Kewajiban
  - 5.1.3. Ekuitas Dana
- 5.2. Penjelasan Pos - Pos Laporan Realisasi Anggaran
  - 5.2.1. Pendapatan
  - 5.2.2. Belanja

**Bab 6 Penjelasan Atas Informasi Non Keuangan**

**Bab 7 Penutup**

**Lampiran Tambahan**



## BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TENGAH

### 2.1. Ekonomi Makro

Dinas pendidikan Provinsi Jawa Tengah pada Tahun Anggaran 2015 memiliki anggaran belanja diluar bantuan sebesar Rp 303.780.015.000,- (tiga ratus tiga milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta lima belas ribu rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 289.079.651.598,- atau sebesar 94,07%. Realisasi anggaran tersebut secara ekonomis juga berdampak pada kegiatan dan usaha di masyarakat sehingga secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh pada ekonomi makro Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

### 2.2. Kebijakan Keuangan

Tahun anggaran 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam menyajikan laporan keuangan. Pertama, Pos-pos dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis cash toward accrual direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual.

Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual baru mulai dilaksanakan pada Tahun 2015 merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode.

Dalam pengelolaan keuangan pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah mengacu pada peraturan-peraturan keuangan yang berlaku. Sejak tahun 2009 untuk penyamaan persepsi terkait pengelolaan keuangan, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Buku Petunjuk Teknis Penatausahaan Keuangan Internal khusus untuk lingkungan Dinas Pendidikan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan. Disamping sebagai petunjuk teknis juga memuat kesepakatan-kesepakatan intern yang meliputi antara lain batas waktu penyerahan SPP dan SPJ oleh Kuasa Pengguna Anggaran pada PPK, tata cara dan prosentase pemungutan pajak dan hal-hal lain yang merupakan rangkuman dari pelaksanaan Bimtek Penatausahaan Keuangan dan hasil rangkuman Peraturan Gubernur nomor 79 Tahun 2014 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015. Pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah menetapkan Petunjuk Teknis Penatausahaan Keuangan dengan Nomor 903/02524.

Kebijakan keuangan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah dengan mempertimbangkan rentang kendali dan beban tugas/kegiatan yang begitu besar/banyak maka Pengguna Anggaran



menunjuk Eselon III sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Eselon IV sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Setiap Kuasa Pengguna Anggaran mempunyai satu Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP).

Sesuai dengan Pergub 58 dimana Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD dapat dijabat oleh Kasubag Keuangan pada Dinas/Badan dan lembaga daerah lainnya, maka Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015 dijabat oleh Kepala Sub Bagian Keuangan. Pejabat Penatausahaan Keuangan mempunyai fungsi perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi yang dalam pelaksanaan tugasnya dilaksanakan oleh staf pada Sub Bagian Keuangan.

Pengelola Keuangan pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah yaitu terdiri dari Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (eselon III) sejumlah 8 orang, Bendahara Pengeluaran Pembantu sejumlah 8 orang, dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sejumlah 18 orang.





### BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

#### 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD.

- 3.1.1. Pendapatan tidak dapat melampaui target yang direncanakan yaitu realisasi pendapatan tahun 2015 sebesar Rp 711.250.000,- atau sebesar 99,98 % dari target yang direncanakan sebesar Rp. 715.000.000,-
- 3.1.2. Daya serap anggaran tahun 2015 sebesar Rp. 285.755.719.828,- atau 94,07 % dari alokasi anggaran sebesar Rp. 303.780.015.000,-.
- 3.1.3. Laporan bulanan, triwulanan dan laporan akhir tahun dapat disusun dan disampaikan secara tepat waktu.
- 3.1.4. Semua Kegiatan dapat diselesaikan s/d 100 % dengan tidak ada kegiatan yang diluncurkan pada tahun berikutnya atau belum selesai.

#### 3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian Target yang telah ditetapkan

Secara umum tidak terdapat hambatan atau kendala yang berarti dalam pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015 dapat dilihat dalam daftar sbb:

IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN SKPD  
TAHUN ANGGARAN 2015

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%	Ket
1	2	3	4	5
<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>303.780.015.000</b>	<b>285.755.719.828</b>	<b>94,07</b>	
<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>106.798.037.000</b>	<b>103.474.105.230</b>	<b>96,89</b>	
<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>196.981.978.000</b>	<b>182.281.614.598</b>	<b>92,54</b>	
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>16.233.775.000</b>	<b>15.887.463.785</b>	<b>97,87</b>	
Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Sekretariat Dinas Pendidikan	145.000.000	144.999.000	100,00	
Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Balai Pengembangan Pendidikan Kejuruan	13.500.000	13.500.000	100,00	
Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Balai Pengembangan Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan	21.000.000	21.000.000	100,00	
Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Balai Pengembangan Pendidikan Khusus	25.920.000	25.920.000	100,00	
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sekretariat Dinas Pendidikan	2.104.560.000	1.980.693.568	94,11	
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Balai Pengembangan Pendidikan Kejuruan	750.000.000	733.918.233	97,86	
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Balai Pengembangan Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan	678.000.000	662.978.432	97,78	



1	2	3	4	5
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Balai Pengembangan Pendidikan Khusus	519.200.000	448.423.296	86,37	
Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran Sekretariat Dinas Pendidikan	217.708.000	156.457.600	71,87	
Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran Balai Pengembangan Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan	100.000.000	100.000.000	100,00	
Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah Sekretariat Dinas Pendidikan	363.249.000	358.492.000	98,69	
Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Sekretariat Dinas Pendidikan	401.175.000	399.773.500	99,65	
Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Balai Pengembangan Pendidikan Kejuruan	45.000.000	45.000.000	100,00	
Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Balai Pengembangan Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan	160.650.000	160.650.000	100,00	
Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Balai Pengembangan Pendidikan Khusus	127.200.000	127.196.000	100,00	
Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan Sekretariat Dinas Pendidikan	636.420.000	631.300.500	99,20	
Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan Balai Pengembangan Pendidikan Kejuruan	55.000.000	55.000.000	100,00	
Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan Balai Pengembangan Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan	58.000.000	58.000.000	100,00	
Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan Balai Pengembangan Pendidikan Khusus	60.000.000	60.000.000	100,00	
Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sekretariat Dinas Pendidikan	197.881.000	197.874.100	100,00	
Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Balai Pengembangan Pendidikan Kejuruan	50.000.000	50.000.000	100,00	
Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Balai Pengembangan Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan	53.000.000	53.000.000	100,00	
Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Balai Pengembangan Pendidikan Khusus	48.960.000	48.960.000	100,00	
Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Balai Pengembangan Pendidikan Kejuruan	350.000.000	350.000.000	100,00	
Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Balai Pengembangan Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan	54.350.000	54.350.000	100,00	
Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sekretariat Dinas Pendidikan	410.190.000	407.866.000	99,43	
Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Balai Pengembangan Pendidikan Kejuruan	59.000.000	59.000.000	100,00	
Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Balai Pengembangan Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan	50.000.000	50.000.000	100,00	
Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Balai Pengembangan Pendidikan Khusus	51.600.000	51.600.000	100,00	
Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Sekretariat Dinas Pendidikan	251.469.000	250.189.000	99,49	



1	2	3	4	5
Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Balai Pengembangan Pendidikan Kejuruan	35.000.000	35.000.000	100,00	
Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Balai Pengembangan Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan	38.000.000	38.000.000	100,00	
Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Balai Pengembangan Pendidikan Khusus	24.480.000	24.424.000	99,77	
Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Sekretariat Dinas Pendidikan	600.000.000	600.000.000	100,00	
Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Balai Pengembangan Pendidikan Kejuruan	32.400.000	32.400.000	100,00	
Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Balai Pengembangan Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan	15.000.000	15.000.000	100,00	
Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Balai Pengembangan Pendidikan Khusus	51.264.000	51.204.000	99,88	
Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah Sekretariat Dinas Pendidikan	1.420.000.000	1.410.919.576	99,36	
Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah Balai Pengembangan Pendidikan Khusus	73.440.000	73.114.000	99,56	
Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Sekretariat Dinas Pendidikan	5.886.159.000	5.851.260.980	99,41	
		-		
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>32.787.390.000</b>	<b>31.279.201.393</b>	<b>95,40</b>	
Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Sekretariat Dinas Pendidikan	206.800.000	202.245.000	97,80	
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Sekretariat Dinas Pendidikan	230.531.000	229.000.000	99,34	
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Sekretariat Dinas Pendidikan	1.013.317.000	999.470.000	98,63	
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Balai Pengembangan Pendidikan Kejuruan	1.150.000.000	1.135.760.550	98,76	
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Balai Pengembangan Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan	400.000.000	396.343.600	99,09	
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Balai Pengembangan Pendidikan Khusus	1.083.700.000	1.068.013.000	98,55	
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Sekretariat Dinas Pendidikan	598.000.000	568.308.400	95,03	
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Balai Pengembangan Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan	53.000.000	53.000.000	100,00	
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Balai Pengembangan Pendidikan Khusus	32.898.000	26.400.543	80,25	
Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Sekretariat Dinas Pendidikan	461.346.000	461.344.900	100,00	
Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Balai Pengembangan Pendidikan Kejuruan	250.000.000	250.000.000	100,00	



1	2	3	4	5
Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Balai Pengembangan Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan	300.000.000	299.470.000	99,82	
Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Balai Pengembangan Pendidikan Khusus	352.985.000	351.265.000	99,51	
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Sekretariat Dinas Pendidikan	382.295.000	382.295.000	100,00	
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Balai Pengembangan Pendidikan Kejuruan	250.000.000	250.000.000	100,00	
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Balai Pengembangan Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan	300.500.000	298.800.000	99,43	
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Balai Pengembangan Pendidikan Khusus	234.800.000	234.221.100	99,75	
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Sekretariat Dinas Pendidikan	173.250.000	173.250.000	100,00	
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Barang Bercorak Kesenian dan Kebudayaan Sekretariat Dinas Pendidikan	23.100.000	23.100.000	100,00	
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Bengkel Balai Pengembangan Pendidikan Kejuruan	700.000.000	700.000.000	100,00	
Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Sekretariat Dinas Pendidikan	1.880.011.000	1.652.997.000	87,92	
Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Pengembangan Pendidikan Kejuruan	17.754.913.000	16.617.614.450	93,59	
Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Pengembangan Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan	2.000.000.000	1.972.654.050	98,63	
Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Pengembangan Pendidikan Khusus	2.955.944.000	2.933.648.800	99,25	
		-		
<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>443.075.000</b>	<b>384.015.625</b>	<b>86,67</b>	
Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya Sekretariat Dinas Pendidikan	443.075.000	384.015.625	86,67	
		-		
<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>4.607.700.000</b>	<b>4.194.876.150</b>	<b>91,04</b>	
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal Balai Pengembangan Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan	1.000.000.000	999.383.150	99,94	
Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	468.130.000	366.390.000	78,27	
Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	687.322.000	622.127.000	90,51	
Kegiatan Peningkatan Kapasitas/Kualitas Sumber Daya Manusia	2.082.257.000	1.850.378.000	88,86	
Kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kebendarawanan	369.991.000	356.598.000	96,38	
		-		
<b>Program Pendidikan Anak Usia Dini</b>	<b>4.359.700.000</b>	<b>4.162.812.250</b>	<b>95,48</b>	
Kegiatan Koordinasi Pengembangan Kelembagaan	2.289.803.000	2.206.991.000	96,38	



1	2	3	4	5
Kegiatan Pemenuhan Sarana dan Prasarana (Sarpras)	517.846.000	481.626.000	93,01	
Kegiatan Koordinasi Pengembangan Kurikulum	599.616.000	560.975.000	93,56	
Kegiatan Koordinasi Pembinaan Kesiswaan	952.435.000	913.220.250	95,88	
		-		
<b>Program Pendidikan Dasar</b>	<b>22.189.669.000</b>	<b>20.289.665.400</b>	<b>91,44</b>	
Kegiatan Koordinasi Pengembangan Kelembagaan	3.901.488.000	3.816.751.000	97,83	
Kegiatan Pemenuhan Sarana Prasarana	773.012.000	636.034.000	82,28	
Kegiatan Koordinasi Pengembangan Kurikulum	2.328.260.000	2.233.317.500	95,92	
Kegiatan Koordinasi Pembinaan Kesiswaan	13.686.909.000	12.117.883.300	88,54	
Kegiatan Pengembangan dan Pengayaan Sumber Belajar DIKDAS	1.500.000.000	1.485.679.600	99,05	
		-		
<b>Program Pendidikan Menengah</b>	<b>40.303.102.000</b>	<b>35.865.776.923</b>	<b>88,99</b>	
Kegiatan Koordinasi Pengembangan Kelembagaan	6.207.139.000	5.811.430.300	93,62	
Kegiatan Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana (Sarpras)	701.946.000	688.167.000	98,04	
Kegiatan Koordinasi Pengembangan Kurikulum	1.684.820.000	1.455.456.000	86,39	
Kegiatan Koordinasi Pembinaan Kesiswaan	21.650.248.000	19.663.035.700	90,82	
Kegiatan Pengembangan dan Pengayaan Sumber Belajar Pendidikan Menengah	1.462.000.000	1.454.387.267	99,48	
Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Menengah Kejuruan Jawa Tengah	8.596.949.000	6.793.300.656	79,02	
		-		
<b>Program Pendidikan Non Formal dan Informal</b>	<b>7.131.587.000</b>	<b>6.800.966.000</b>	<b>95,36</b>	
Kegiatan Koordinasi Pengembangan Kelembagaan	2.543.380.000	2.372.065.500	93,26	
Kegiatan Pembinaan Warga Belajar dan Pendidikan Masyarakat	2.804.285.000	2.732.469.500	97,44	
Kegiatan Koordinasi Pengembangan Kurikulum PNF	783.922.000	709.707.000	90,53	
Kegiatan Pengembangan dan Pengayaan Sumber Belajar Pendidikan Non Formal (PNF)	1.000.000.000	986.724.000	98,67	
		-		
<b>Program Pendidikan Khusus</b>	<b>8.740.000.000</b>	<b>8.254.450.100</b>	<b>94,44</b>	
Kegiatan Koordinasi Pengembangan Kelembagaan	3.540.000.000	3.437.283.000	97,10	
Kegiatan Koordinasi Pembinaan Kesiswaan	2.000.000.000	1.908.256.250	95,41	
Kegiatan Koordinasi pengembangan kurikulum	2.200.000.000	1.919.002.350	87,23	
Kegiatan Pengembangan dan Pengayaan Sumber Belajar Pendidikan Khusus	1.000.000.000	989.908.500	98,99	
		-		
<b>Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan</b>	<b>30.739.385.000</b>	<b>29.229.536.880</b>	<b>95,09</b>	
Kegiatan Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Diktendik Formal dan Non Formal	2.022.476.000	1.911.849.000	94,53	
Kegiatan Kualifikasi Akademik Pendidik dan Tenaga Kependidikan Formal dan Non Formal	386.169.000	363.317.000	94,08	
Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Profesi Diktendik Dikmen	536.007.000	526.570.000	98,24	
Kegiatan Harlindung Diktendik dan Kesra Pendidik dan Tenaga Kependidikan Formal dan Non Formal	2.409.786.000	2.189.674.000	90,87	



1	2	3	4	5
Kegiatan Pengembangan Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Formal dan Non Formal	904.745.000	845.301.000	93,43	
Kegiatan Peningkatan Kompetensi Teknis Guru Unit Pelaksana Teknis BP-Dikjur	6.900.000.000	6.848.300.980	99,25	
Kegiatan Peningkatan Kompetensi Teknis Guru Unit Pelaksana Teknis BP-TIKP	1.000.000.000	992.469.800	99,25	
Kegiatan Peningkatan Kompetensi Teknis Guru Unit Pelaksana Teknis BP-DIKSUS	1.596.000.000	1.323.230.000	82,91	
Kegiatan Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Diktendik Dikdas	3.787.415.000	3.532.047.500	93,26	
Kegiatan Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme Ditendik Dikmen	3.822.748.000	3.655.783.000	95,63	
Kegiatan Akademik Diktendik Dikdas	622.390.000	572.845.000	92,04	
Kegiatan Akademik Diktendik Dikmen	296.762.000	293.843.000	99,02	
Kegiatan Harlindung dan Kesra Diktendik Dikdas	2.957.445.000	2.774.305.600	93,81	
Kegiatan Harlindung dan Kesra Diktendik Dikmen	2.392.540.000	2.306.700.500	96,41	
Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Profesi Diktendik Dikdas	1.104.902.000	1.093.300.500	98,95	
		-		
<b>Program Manajemen Pelayanan Pendidikan</b>	<b>18.282.593.000</b>	<b>15.998.649.892</b>	<b>87,51</b>	
Kegiatan Pengembangan Sistem Pendataan Pendidikan	700.370.000	545.114.000	77,83	
Kegiatan Penguatan Perencanaan Pendidikan	1.335.753.000	1.162.330.300	87,02	
Kegiatan Penguatan Tata Kelola dan Citra Publik	5.810.227.000	5.662.215.500	97,45	
Kegiatan Koordinasi Kerjasama Bidang Pendidikan	1.000.000.000	848.261.900	84,83	
Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Ujian Sekolah/Madrasah(US/M) dan Ujian Nasional (UN)	6.743.443.000	5.240.019.501	77,71	
Kegiatan Pendampingan Visitasi Sekolah	2.692.800.000	2.540.708.691	94,35	
		-		
<b>Program Fasilitasi Pendidikan Tinggi</b>	<b>5.170.600.000</b>	<b>4.706.954.500</b>	<b>91,03</b>	
Kegiatan Koordinasi Potensi Akademi Mahasiswa	296.380.000	241.960.000	81,64	
Kegiatan Pemberdayaan KKN bagi pengembangan pedesaan di desa vokasi	620.525.000	544.945.000	87,82	
Kegiatan Peningkatan Potensi Pendidikan Tinggi	497.070.000	443.790.000	89,28	
Kegiatan Pembinaan Pendidikan Tinggi	3.756.625.000	3.476.259.500	92,54	
<b>Program Pendidikan Berkelanjutan</b>	<b>5.582.600.000</b>	<b>4.888.843.700</b>	<b>87,57</b>	
Kegiatan Koordinasi Pendidikan Untuk Semua	659.000.000	476.932.000	72,37	
Kegiatan Pembinaan Nasionalisme Pendidikan	3.430.050.000	2.979.008.700	86,85	
Kegiatan Koordinasi Publikasi Kinerja Pendidikan	743.550.000	717.532.000	96,50	
Kegiatan Pendidikan Mitigasi Bencana Alam	750.000.000	715.371.000	95,38	
		-		
<b>Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak</b>	<b>410.802.000</b>	<b>338.402.000</b>	<b>82,38</b>	
Kegiatan Pengembangan model pencegahan kekerasan berbasis gender di sekolah	206.091.000	169.891.000	82,43	
Kegiatan Pengembangan model Pendidikan Keluarga Berbasis Gender (PKBG)	204.711.000	168.511.000	82,32	





## BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

### 4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD

SKPD Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah sebagai Entitas Akuntansi mengikuti peraturan-peraturan yang terkait dengan kebijakan akuntansi yang dibuat oleh Entitas Laporan yaitu Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Sejak dibangunnya Sistem Aplikasi/SIPKD di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah sebagai dinas yang mempunyai kegiatan terbanyak dan anggaran yang besar ditunjuk sebagai Piloting Sistem Aplikasi/SIPKD dimaksud dan sejak Tahun 2011 s.d 2015 telah menggunakan Sistem Aplikasi/SIPKD secara penuh.

Proses Penatausahaan dan Pelaporan pada Tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014 sudah dapat menyajikan Laporan Keuangan melalui Aplikasi/SIPKD, namun untuk implementasi akuntansi berbasis akrual pada tahun 2015 SIPKD mengalami berbagai kendala.

### 4.2. Basis dan Prinsip Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

SKPD Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis Kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan basisi kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

### 4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang di terapkan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut.

### 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan yang ada dalam SAP SKPD

#### 4.4.1. Pendapatan - LRA

- Pendapatan adalah semua penerimaan yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan.
- Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada Kas Daerah



- Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya.
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

#### 4.4.2. Pendapatan – LO

- Pendapatan – LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan – LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan Pendapatan LO pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut :
  - Pendapatan sewa diakui secara proposional antara nilai dan periode waktu sewa.
  - Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya.
  - Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

#### 4.4.3. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari bendahara pengeluaran

#### 4.4.4. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

#### 4.4.5. Penambahan aset secara terencana, menggunakan Rekening Belanja Modal.

#### 4.4.6. Biaya perolehan aset menambah nilai aset

#### 4.4.7. Seluruh rencana pengadaan Barang yang menjadi aset sudah dialokasikan dengan biaya perolehan yang tersusun dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA).





## BAB V

## PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

## 5.1. Laporan Realisasi Anggaran

## 5.1.1 Pendapatan

Keseluruhan pendapatan daerah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah merupakan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) lainnya. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah diberikan estimasi pendapatan asli daerah sebesar Rp. 715.000.000,-.

Realisasi pendapatan asli daerah dari retribusi pemakaian kekayaan daerah Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 711.250.000,- atau 99,98 persen.

## 5.1.2. Belanja

Realisasi belanja Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah pada Tahun Anggaran 2015 setelah dikurangi pengembalian belanja adalah sebesar Rp. 285.775.719.828,- atau 94,07 persen dari anggaran sebesar Rp. 303.780.015.000,-

Anggaran dan realisasi belanja Tahun Anggaran 2015 menurut program dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Prog. Pelayanan Adm. Perkantoran	16.233.775.000	15.887.463.785	97,87
2	Prog. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	32.787.390.000	31.279.201.393	95,40
3	Prog. Peningkatan Disiplin Aparatur	443.075.000	384.025.625	86,67
4	Prog. Peningkatan Kapasitas SDM	4.607.700.000	4.194.876.150	91,04
5	Prog. Pendidikan Anak Usia Dini	4.359.700.000	4.162.812.250	95,48
6	Prog. Pendidikan Dasar	22.189.669.000	20.289.665.400	91,44
7	Prog. Pendidikan Menengah	40.303.102.000	35.865.776.923	88,99
8	Prog. Pendidikan Non Formal dan Informal	7.131.587.000	6.800.966.000	95,36
9	Prog. Pendidikan Khusus	8.740.000.000	8.254.450.100	94,44
10	Prog. Peningkatan Mutu Pendidik dan Non Kependidikan	30.739.385.000	29.229.536.880	95,09
11	Prog. Manajemen Pelayanan Pendidikan	18.282.593.000	15.995.649.892	97,51
12	Prog. Fasilitasi Perguruan Tinggi	5.170.600.000	4.706.954.500	91,03
13	Prog. Pendidikan Berkelanjutan	5.582.600.000	4.888.843.700	87,57
14	Prog. Peningkatan Kualitas Hidup, Perlindungan dan Anak	410.802.000	388.402.000	82,38

Sedangkan menurut jenis dan realisasi belanja, anggaran dan realisasinya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No	Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Pegawai	106.798.037.000	103.474.105.230	96,89
2	Belanja Barang	147.778.707.000	135.563.070.590	91,73
3	Belanja Modal	24.627.371.000	23.217.789.000	91,73
	JUMLAH	279.204.115.000	262.254.964.820	



Realisasi belanja TA 2015 mengalami penurunan/kenaikan sebesar Rp. 2.847.028.857,- atau 1.09 persen dibandingkan realisasi belanja TA 2014 disebabkan adanya peningkatan realisasi belanja pegawai karena adanya kenaikan tunjangan kinerja pegawai.

Perbandingan realisasi belanja TA 2015 dan 2014 dapat dilihat pada tabel di bawah ini

No	Jenis Belanja	Realisasi Belanja (Rp)		Naik/(Turun)	
		TA 2015	TA 2014	Rp.	%
1	Belanja Pegawai	103.474.105.230	94.418.061.367	9.056.043.863	
2	Belanja Barang	135.563.070.590	152.156.105.196	16.593.034.606	
3	Belanja Modal	23.217.789.000	12.833.789.400	10.383.999.600	
	JUMLAH	262.254.964.820	259.407.955.963	2.847.008.857	

#### 5.1.3. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah TA 2015 dan 2014 setelah dikurangi pengembalian belanja masing-masing sebesar Rp. 103.474.105.230,- dan Rp. 94.418.061.367,-. Kenaikan realisasi belanja pegawai sebesar Rp. 9.056.043.863,- disebabkan adanya kenaikan tunjangan kinerja pegawai.

Perbandingan Rincian realisasi belanja pegawai TA 2015 dan 2014 disajikan dalam tabel di bawah ini :

No	Uraian	Realisasi Belanja (Rp)		Naik/(Turun)	
		TA 2015	TA 2014	Rp.	%
1	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	52.049.872.292	48.643.616.667	3.406.255.625	7.00
2	Tambahan Penghasilan Pegawai	51.424.232.938	45.760.463.200	5.663.769.738	12.38
	Jumlah Belanja Bruto	103.474.105.230	94.418.061.367	9.056.043.863	9.59
3	Pengembalian Belanja Pegawai				
	Realisasi Belanja Netto	103.474.105.230	94.418.061.367	9.056.043.863	9.59

Rincian pengembalian belanja pegawai sebesar Rp. 1.885.629.708, terdiri atas :

Uraian	Rp.
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	985.887.100,00
Tunjangan Keluarga	89.405.052,00
Tunjangan Jabatan	-
Tunjangan Fungsional	2.310.000,00
Tunjangan Umum	1.830.000,00
Tunjangan Beras	325.471.160,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	209.694.078,00
Pembulatan Gaji	11.882,00
Iuran BPJS Kesehatan	102.185.216,00
Iuran BPJS Ketenagakerjaan	168.835.220

#### 5.1.4. Belanja Barang

Realisasi belanja barang TA 2015 dan 2014 setelah dikurangi pengembalian belanja masing-masing sebesar Rp. 135.563.070.590,- dan Rp. 152.156.105.196,-. Penurunan/kenaikan realisasi belanja barang sebesar Rp.16.593.004.606,- atau ..... persen

Perbandingan Rincian realisasi belanja TA 2015 dan 2014 disajikan dalam tabel di bawah ini :



No	Uraian	Realisasi Belanja (Rp)		Naik/(Turun)	
		TA 2015	TA 2014	Rp.	%
1	Belanja persediaan	59.518.549.315	66.657.446.675	7.138.897.360	
2	Belanja barang/jasa lainnya		7.276.450.000	7.276.450.000	
3	Belanja Jasa	43.600.771.226	54.369.638.887	10.768.867.661	
4	Belanja Pemeliharaan	7.372.716.743	7.856.059.000	483.342.257	
5	Belanja perjalanan dinas	15.314.787.531	16.300.280.634	985.493.103	
	Jumlah bruto	125.806.824.815	152.459.875.196	19.376.600.381	
6	Pengembalian belanja				
	Jumlah Netto	125.806.824.815	152.459.875.196	19.376.600.381	

#### 5.1.5. Belanja Modal

Realisasi belanja modal TA 2015 dan 2014 setelah dikurangi pengembalian belanja masing-masing sebesar Rp. 23.217.789.300,- dan Rp. 12.833.789.400,- Penurunan/kenaikan realisasi belanja modal sebesar Rp. 10.383.999.900 atau 1.81 persen.

Perbandingan rincian belanja modal TA 2015 dan 2014 disajikan dalam tabel di bawah ini :

No	Uraian	Realisasi Belanja (Rp)		Naik/(Turun)	
		TA 2015	TA 2014	Rp.	%
1	Belanja modal peralatan dan mesin	8.926.756.300	11.230.975.400	2.304.219.100	0.79
2	Belanja modal gedung dan bangunan	13.189.044.900	1.499.129.000	11.689.915.900	8.80
3	Belanja modal lainnya	500.170.100	103.685.000	396.485.100	4.82
	Jumlah bruto	23.217.789.300	12.833.789.400	10.383.999.900	14.42
4	Pengembalian belanja				
	Jumlah Netto	23.217.789.300	12.833.789.400	10.383.999.900	14.42

#### 5.1.6. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi belanja modal peralatan dan mesin TA 2015 dan 2014 setelah dikurangi pengembalian belanja masing-masing sebesar Rp. 8.926.756.300 dan Rp. 11.230.975.400,- Penurunan realisasi belanja modal sebesar Rp. 2.304.219.100 atau 0.79 persen.

#### 5.1.7. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi belanja modal gedung dan bangunan TA 2015 dan 2014 setelah dikurangi pengembalian belanja masing-masing sebesar Rp. 13.189.044.900,- dan Rp. 1.499.129.000,- kenaikan realisasi belanja modal sebesar Rp.11.689.915.900. atau 8.80 persen.

### 5.2. Aset Lancar

Nilai aset lancar per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 masing-masing sebesar Rp.400.403.633,- dan Rp. 439.976.850,-. Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

Perbandingan rincian aset lancar per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 disajikan pada tabel di bawah ini :



No	Aset Lancar	31 Desember 2015	31 Desember 2014
1	Belanja dibayar di muka	271.582.833	293.021.500
2	Persediaan	128.820.800	146.955.350
	Jumlah	400.403.633	439.976.850

### 5.2.1. Kas di Bendahara Pengeluaran yang belum disetor

Kas di Bendahara Pengeluaran yang belum disetor merupakan sisa uang persediaan pada bendahara pengeluaran yang sampai dengan 31 Desember 2015 belum disetor ke Rekening Kas Umum Daerah dan merupakan bagian dari SILPA Tahun 2015 baik tunai maupun simpanan yang ada di rekening bank (termasuk jasa gironya).

NO	Uraian	2015	2014
1	Tunai	0	0
2	Bank	0	0
	Jumlah	0	0

### 5.2.2. Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2015 dan per 31 Desember 2014 masing-masing sebesar Rp. 128.820.800,- dan Rp. 146.955.350,-

### 5.3. Aset Tetap

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 masing-masing sebesar Rp. 385.522.113.000,33 dan Rp. 301.143.974.353,46 yang merupakan aset dan mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan, dan digunakan dalam kegiatan operasional Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah

No	Uraian	31 Desember 2015	31 Desember 2014
1	Tanah	104.450.682.852	104.450.682.852
2	Peralatan dan Mesin	90.112.853.200,93	81.283.247.885
3	Gedung dan Bangunan	123.307.917.778,33	109.923.909.545
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.126.878.422	1.718.424.422
5	Aset Tetap lainnya	4.708.105.577	4.207.935.477,46
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan		
	Akumulasi Penyusutan	102.006.240.125,36	90.695.736.486,09
	Jumlah	385.522.113.000,33	301.143.974.353,46

#### 5.3.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran (Non Silpa)

Kas di Bendahara Pengeluaran (Non Silpa) adalah saldo kas pada Bendahara Pengeluaran di SKPD per 31 Desember 2015 yang akan dipergunakan untuk membayar kewajiban kepada pihak ketiga. Belanja atas kegiatan yang bersangkutan sudah di SPJ kan dan sudah dimasukkan dalam LRA Tahun Anggaran 2015.

NO	Uraian	2015	2014
1	Tunai	0	0
2	Bank	0	0
	Jumlah	0	0



**5.3.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan**

Kas di Bendahara Penerimaan adalah saldo kas pada Bendahara Penerimaan SKPD (baik yang ada di rekening bank maupun brankas) yang berasal dari pendapatan retribusi, lain-lain PAD yang sah dan jasa giro bendahara yang belum disetor ke rekening kas umum daerah per 31 Desember 2015.

**5.3.1.3. Piutang Pajak**

Piutang pajak adalah pendapatan pajak yang sudah menjadi hak Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tetapi sampai dengan 31 Desember 2015 belum dibayar oleh wajib pajak (**disertai penjelasan yang spesifik**).

**5.3.2. Aset Tetap**

No	Uraian	2015	2014
1	Tanah	104.450.682.852	104.450.682.852
2	Peralatan dan Mesin	81.283.247.885	90.112.853.200,93
3	Gedung dan Bangunan	109.923.909.557	109.923.909.545
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.126.878.422	1.718.424.422
5	Aset Tetap lainnya	4.708.105.577	4.207.935.477,46
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0
	<b>Jumlah</b>	<b>222.700.197.704,90</b>	<b>277.641.591.121</b>

Rincian mutasi aset tetap terdiri dari :

Penambahan	2015
Koreksi dan Penilaian	0
Reklasifikasi Masuk	
Hibah	
Mutasi Masuk	
Kapitalisasi non Belanja Modal	
Belanja Modal	
<b>Jumlah</b>	
Pengurangan	2015
Koreksi	
Reklasifikasi Keluar	
Ekstrakontable	
Hibah	
Mutasi Keluar	
Penghapusan	
<b>Jumlah</b>	



### 5.3.3. Aset Lainnya

Reklas keluar terdiri dari:

No	Uraian	2015	2014
1	Alat-alat bengkel	17.824.045.720,68	0
2	Alat kantor dan rumah tangga	54.867.890.279,76	710.348.364
3	Alat studio dan komunikasi	8.446.072.852,49	15.217.599
4	Alat laboratorium	1.784.106.057	0
5	Barang bercorak seni dan budaya	0	0
<b>Jumlah</b>		<b>82.922.114.909,93</b>	<b>1.326.138.963</b>

### 5.3.4. Ekuitas Dana

#### EKUITAS DANA LANCAR

No	Uraian	2015	2014
1	Ekuitas Perubahan SAL	285.044.469.828	288.379.093.642
2	Pendapatan yang ditangguhkan	0	0
3	Cadangan Persediaan	128.820.800	146.414.400
	<b>Jumlah</b>	<b>85.173.290.628</b>	<b>288.379.093.642</b>

#### EKUITAS DANA INVESTASI

No	Uraian	2015	2014
1	Diinvestasikan dalam aset tetap	222.700.197.704,90	263.604.236.062,73
2	Diinvestasikan dalam aset lainnya (tidak termasuk Dana Cadangan)	336.550.800	1.418.994.414

### 5.4. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

#### 5.4.1. Pendapatan

No	Uraian	2015	2014
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	711.250.000	530.850.000
2	Penerimaan Lain-Lain SKPD		0
	<b>Jumlah</b>	<b>711.250.000</b>	<b>530.850.000</b>

Berdasarkan Tabel Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2015 dan 2014 di atas menunjukkan bahwa realisasi pendapatan pada TA 2015 mengalami kenaikan dari realisasi pendapatan TA 2014.

Hal ini disebabkan antara lain:

1. Meningkatnya pemakaian obyek retribusi kekayaan daerah oleh masyarakat umum, sehingga.
2. Dukungan informasi/brosur adanya obyek retribusi kekayaan daerah yang bisa digunakan oleh masyarakat umum.



Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah pada TA 2015, memperoleh Dana Bagi Hasil dari Pemda Lainnya sebesar Rp 171.125.000.

#### 5.4.2. Belanja

##### 5.4.2.1. Belanja Pegawai

Merupakan belanja pegawai baik yang ada pada Belanja Tidak Langsung maupun Belanja Langsung.

No	Uraian	2015	2014
I.	Belanja Tidak Langsung	103.474.105.230	94.418.061.367
II.	Honorarium PNS	1.098.769.700	5.572.064.500
III.	Honorarium Non PNS	22.401.985.000	23.433.893.179
IV.	Uang Lembur		3.204.000
	JUMLAH	126.974.859.930	123.427.223.046

Realisasi Belanja Pegawai Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah pada TA 2015 meliputi: Belanja Tidak Langsung, Honorarium PNS, Honorarium Non PNS dan Uang Lembur.

Realisasi Belanja Pegawai TA 2015 dan TA 2014 adalah masing-masing sebesar Rp **123.427.223,046** dan Rp 126.974.859.930,- Berdasarkan Tabel di atas, realisasi belanja TA 2015 mengalami penurunan dari realisasi belanja TA 2014. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Adanya penambahan pegawai maupun kenaikan tunjangan
2. Adanya kenaikan gaji secara nasional dan kenaikan gaji reguler.

##### 5.4.2.2. Belanja Barang/Jasa

No	Uraian	2015	2014
1	Belanja Bahan Pakai Habis	13.864.140.300	16.684.686.325
2	Belanja Bahan/Material	3.047.127.000	3.100.558.500
3	Belanja Jasa Kantor	22.198.587.529	23.765.199.412
4	Belanja Premi Asuransi	450.731.280	390.458.200
5	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	650.659.943	436.239.000
6	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.232.596.590	11.869.385.050
7	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	17.269.832.300	24.539.602.775
8	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.406.038.000	2.786.532.000
9	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.993.447.100	3.180.868.000
10	Belanja Makanan dan Minuman	31.305.414.750	32.695.291.800
11	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	372.465.625	636.122.000
12	Belanja Pakaian Kerja	689.560.000	616.199.000



No	Uraian	2015	2014
13	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	989.110.500	1.058.412.500
14	Belanja Perjalanan Dinas	15.314.787.531	16.300.280.634
15	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	94.689.000	276.450.000
16	Belanja Pemeliharaan	6.722.056.800	7.419.820.000
17	Belanja jasa konsultasi, penghargaan dan hadiah	9.961.820.350	
	<b>JUMLAH</b>	<b>135.563.070.598</b>	<b>145.756.105.196</b>

### 5.4.2.3. Belanja Modal

#### 5.4.2.3.1. Belanja Modal Tanah

No	Uraian	2015	2014
1	Belanja Modal Pengadaan Tanah	0	0
	<b>JUMLAH</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 5.4.2.3.2. Belanja Peralatan dan Mesin

No	Uraian	2015	2014
1	Alat-alat Berat	0	0
2	Alat-alat Angkut	202.245.000	671.325.000
3	Alat-alat Bengkel		1.480.481.000
4	Alat-alat Kantor	1.107.834.100	1.104.897.000
5	Perlengkapan Kantor	2.131.733.250	2.168.295.000
6	Pengadaan Komputer	2.529.019.950	2.235.794.250
7	Pengadaan Mebelair	21.010.000	2.265.984.650
8	Alat-alat Studio	584.494.000	1.103.898.500
9	Alat Kantor dan Rumah Tangga	0	0
10	Alat-alat Komunikasi	306.909.000	200.300.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>8.926.756.300</b>	<b>11.230.975.400</b>

#### 5.4.2.3.3. Belanja Gedung dan Bangunan

No	Uraian	2015	2014
1	Bangunan	13.189.044.900	1.499.129.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>13.189.044.900</b>	<b>1.499.129.000</b>

#### 5.4.2.3.4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

No	Uraian	2015	2014
1	Jalan dan Jembatan	0	0
2	Bangunan air (Irigasi)	0	0
3	Instalasi dan Jaringan	0	0
	<b>JUMLAH</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





5.4.2.3.5. Belanja Aset Tetap Lainnya

No	Uraian	2015	2014
1	Buku Perpustakaan	190.037.000	103.685.000
2	Barang Bercorak Kesenian & Kebudayaan	0	0
3	Hewan Ternak dan Tanaman	0	0
	<b>JUMLAH</b>	<b>190.037.000</b>	<b>103.685.000</b>

5.5. Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional

5.5.1. Pendapatan Retribusi Daerah

No	Uraian	2015	2014
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	711.250.000	621.400.000
2	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	0	16.580.000
3	Lain-lain Pendapatan yang sah	0	55.100.000
	<b>Jumlah</b>	<b>711.250.000</b>	<b>693.12024.000</b>

5.5.2. Beban Operasional

No	Uraian	2015	2014
1	Beban pegawai	126.974.859.930	123.427.223.046
2	Beban Persediaan	59.518.549.315	66.657.446.675
3	Beban Jasa	43.600.771.226	54.369.638.887
4	Beban Pemeliharaan	7.372.716.743	7.856.059.000
5	Beban Perjalanan Dinas	15.314.787.531	16.300.280.634
6	Beban Penyusutan	11.310.503.639,27	11.003.170.874,63
7	Beban Penghapusan aset	112.183.600	1.432.396.549,17
8	Beban Lain-lain	9.795.819.000	7.276.450.000
	<b>Jumlah</b>	<b>274.000.190.984</b>	<b>288.033.665.665,80</b>



## BAB VII PENUTUP

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan SKPD Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk Tahun Anggaran 2015. Catatan atas Laporan Keuangan tersebut disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, **Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 79 Tahun 2014** tentang Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015.

Kami berharap penyampaian Catatan atas Laporan Keuangan ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders) serta memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan fairness dalam pengelolaan keuangan daerah.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

Drs. NUR HADI AMIYANTO, M.Ed  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19590522 198603 1 009





PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS PENDIDIKAN  
Jl. Pemuda 134 Telp. (024) 3515301 Faximile (024) 3520071  
Semarang 50132

## PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan keuangan SKPD Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Neraca (c) Laporan Operasional; (d) Laporan Perubahan Ekuitas dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2015 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan Catatan atas Laporan Keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Semarang, 31 Desember 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

Drs. NUR HADI AMIYANTO, M.Ed  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19590522 198603 1 009



**LAMPIRAN :**

1. Lampiran 1.2 Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Cetak SIPKD)
2. Lampiran II Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Cetak SIPKD)
3. Daftar Potensi Aset Tahun Anggaran 2015.
4. Berita Acara Stock Opname Tahun Anggaran 2015.
5. Berita Acara Serah Terima Aset Tahun Anggaran 2015.
6. Berita Acara Penghapusan Aset dan Hibah Aset Tahun Anggaran 2015.



DAFTAR ISI :

BAB I .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
PENDAHULUAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan .....	4
1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan .....	5
BAB II .....	7
2.1. Ekonomi Makro .....	7
2.2. Kebijakan keuangan.....	7
BAB III .....	9
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN .....	9
1.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD.....	9
3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian Target yang telah ditetapkan .....	9
BAV IV .....	15
KEBIJAKAN AKUNTANSI.....	15
4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD.....	15
4.2. Basis dan Prinsip Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD .....	15
4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan SKPD.....	15
4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan yang ada dalam SAP SKPD .....	15
BAB V .....	17
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN .....	17
5.1. Penjelasan Pos –Pos Neraca.....	<b>Error!</b>
<b>Bookmark not defined.</b>	
5.1.1.1.Kas di Bendahara Pengeluaran <b>Error! Bookmark not defined.</b>	
5.1.1.2.Kas di Bendahara Pengeluaran (Non Silpa) .....	20
5.1.1.3.Kas di Bendahara Penerimaan 21	
5.1.1.4.Piutang Pajak .....	21
5.1.1.5. Persediaan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
5.1.2. Aset tetap .....	21
5.1.3. Ekuitas Dana .....	22
5.2. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran .....	22
5.2.1.Pendapatan .....	22
5.2.2.Belanja .....	22
5.2.2.1.Belanja Pegawai .....	23
5.2.2.2.Belanja Barang/Jasa .....	23
5.2.2.3.Belanja Modal .....	24
5.2.2.3.1.Belanja Modal Tanah.....	24
5.2.2.3.2.Belanja Peralatan dan Mesin.....	24
5.2.2.3.3.Belanja Gedung dan Bangunan.....	24
5.2.2.3.4.Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan .....	24
5.2.2.3.5.Belanja Aset Tetap Lainnya.....	25
BAB VI .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
INFORMASI NON KEUANGAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
BAB VII .....	26
PENUTUP .....	26
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB.....	27
LAMPIRAN : 28	

